

**PENGAWASAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT(KUR)
PADA KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDONESIA
UNIT AHMAD YANI KOTA MAKASSAR**

ARIANI

Nomor Stanbuk : 10561 04375 13



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

HALAMAN PENGAJUAN

**PENGAWASAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT(KUR)
PADA KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDONESIA
UNIT AHMAD YANI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara .

Disusun dan diajukan oleh

ARIANI

Nomor Stanbuk : 10561 045375 13

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Program Kredit Usaha Rakyat (Kur)
pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit
Ahmad Yani Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Ariani

Nomor Stambuk : 1056 104375 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Idris, M.Si

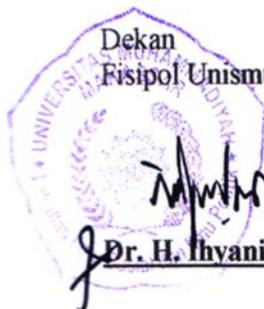
Pembimbing II



Drs. Alimuddin Said, M.Pd

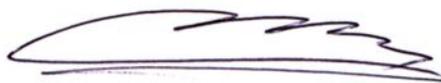
Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si

Ketua jurusan
Ilmu Administrasi Negara



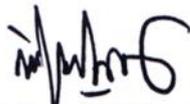
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan meguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0049/FSP/A.1-VIII/I/38/2018 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Selasa, Tanggal 16 Januari 2018

TIM PENILAI

Ketua,



Dr. H. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si

Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

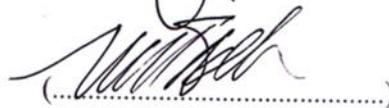
Penguji

1. Dr. H. Fatmawati, M.SI (Ketua)



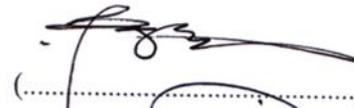
(.....)

2. Drs. Alimuddin Said, M. Pd



(.....)

3. Adnan Ma'Ruf, S. Sos, M. SI



(.....)

4. Nasrul Haq, M. PA



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariani
Nomor Stanbuk : 10561 04375 13
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar.

Makassar, 04 Januari 2018

Yang menyatakan

Ariani

ABSTRAK

ARIANI, Pengawasan Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar (dibimbing oleh Muhammad Idris dan Alimuddin Said)

Program Kredit Usaha Rakyat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan usaha masyarakat kecil terutama bagi para UMKM. Pengawasan program Kur pada Bri Unit Ahmad Yani sangat penting dilakukan agar pelaksanaan program kur terus berjalan dengan baik dan lancar dalam untuk tetap mensejahterakan masyarakat kecil yang memiliki usaha, mengingat program Kur tersebut merupakan target utama bagi masyarakat kecil yang memiliki usaha produktif untuk menghasilkan tambahan modal tanpa memikirkan jaminan agunan besar, namun terkadang ditemui juga para Umkm yang melakukan kredit macet padahal diketahui bahwa program Kur tersebut merupakan agunan paling rendah dibuat oleh Pemerintah. Karena diketahui bahwa program kur merupakan diperuntukkan bagi para masyarakat kecil yang memiliki usaha produktif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Tipe penelitian deskriptif. Informan berjumlah delapan orang, teknik informan *Purposive* dengan instrumen penelitian menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia tersebut memiliki bagian pengawasan yaitu audit internal. Sehingga pengawasan Program Kredit Usaha Rakyat dilakukan oleh audit internal telah efektif karena audit internal melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pihak Bri, meski terkadang ditemui kesalahan dalam pelaksanaan Kur namun pihak audit internal dapat menyelesaikan kesalahan tersebut dan tanpa merugikan program Kur tersebut. Dilihat dari persentasi kur pada tiga tahun terakhir membuktikan bahwa program kur adanya suatu peningkatan, yang membuktikan bahwa program kur merupakan keunggulan para UMKM untuk memperoleh tambahan modal usaha tanpa memikirkan agunan besar.

Kata Kunci : Pengawasan, Bri Ahmad Yani

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar”.

Skripsi merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi isyarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sembah sujud dan kupersembahkan skripsi ini terkhususkan kepada orang tua tercinta ayahanda Langgong dan Ibunda tercinta Normah, terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran dan doa dukungan dan semangat yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi. Terima kasih juga kepada kakak dan adek tercintaku yang terus memberikan dukungan dan semangatnya, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia – siakan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Muhammad Idris, S. Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Drs. Alimuddin Said selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diiselesaikan.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE. MM
3. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Para dosen yang memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada Keluargaku Ibu Bapak dan saudara – saudaraku yang senantiasa mendpalam sejomgga segala urusan penulis selama ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Kepada pihak Karyawan Bank khususnya bagian pelayanan Kur yang telah membantu dalam pengambilan data,penulis mengucapkan banyak terima kasih.
8. Terima kasih kepada Bapak Ibu selaku para debitur Kur yang senantiasa meluangkan waktu sibuknya dalam berjualan tapi tetap menuempatkan waktunya di wawancara sehingga saya dapat pemcerajam dalam menulis sehingga skripsi ini dapat selesai saat ini.
9. Teman – teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 serta teman – teman dan kakanda senior Ilmu Administrtasi Negara terima kasij karena telah mengisi hari – hari penulis dengan suka dan duka sejingga skripsi ini dapat selesai sampai saa
10. Terima kasih kepada sahabat rantau (Nurul Nabola, Irma Sari, Retna, dan Retno dan Hikma ihsani) yang selama ini selalu ada dalam motivasi penulis.
11. Terima kasih juga kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhirnya
12. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang penulis tidak dapat sebut satu persatu

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun dari pembaca maupun pihak lain. Akhir kata semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan akhir yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 4 Januari 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Konsep dan Teori	10
1. Pengertian pengawasan	10
a. Pengertian pengawasan	10
b. Konsep Pengawasan	11
c. Pengawasan Internal	13
d. Tujuan Pengawasan Kur	14
e. Ruanag Lingkup Pengawasan Internal Kur	15
f. Manfaat Pengawasan	17
g. Tahap – tahap Pengawasan	18
2. Konsep Pengawasan Internal	20
3. Kredit Usaha Rakyat	22
a. Pengertian Kur	22
b. Cara Mengakses Kur	23
4. Prosedur Audit Internal atas Kur	24
5. Prosedur Audit Internal atas Kur di Bri unit Ahmad Yani	24
B. Kerangka Pikir	30
C. Fokus Penelitian	32
D. Deskripsi Fokus Penelitian	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan tipe Penelitian`	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Keabsahan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	39
B. Pengawasan Program Kur di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar	55
1. Audit Internal Program kredit Usaha Rakyat Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar	63
2. Review dan Pengujian Program kredit Usaha Rakyat Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Daftar Informan Penelitian	31
2.	Keadaan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar	36
3.	Jumlah Pegawai Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar	45
4.	Struktur Organisasi Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari siklus peredaran uang, di mana industri perbankan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam sistem perekonomian. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006). Salah satu dari peran tersebut ialah pengalihan aset. Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah fasilitas kredit.

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006), bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai perjanjian. Mengingat hal tersebut dan adanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank serta adanya risiko yang selalu melekat dalam penyaluran dana, maka sebelum kredit disalurkan, bank selalu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan nasabah debitur untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank.

Salah satu ruang lingkup kegiatan Bank Rakyat Indonesia adalah memberikan fasilitas kredit kepada sektor usaha, di mana kredit tersebut bersumber dari dana yang dihimpun dari giro, deposito, dan tabungan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai bank umum, kebijaksanaan perkreditan Bank Rakyat Indonesia senantiasa diarahkan pada semua sektor usaha dengan pemberian kredit jangka pendek dan menengah serta prioritas sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuan perkreditan tersebut, Bank Rakyat Indonesia telah ikut serta secara aktif dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat atau sektor usaha yang pembiayaannya bersumber dari dana yang dihimpun dari masyarakat itu sendiri.

Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank telah berjalan dengan baik sekaligus memberikan perbaikan atas segala kekurangan yang ditemukan dalam rangka menunjang efektivitas, maka bank perlu melakukan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional yang dijalankan. Salah satu alat yang dapat digunakan bank dalam memastikan aktivitas bank telah berjalan dengan baik dan menunjang terwujudnya efektivitas kegiatan operasional perbankan adalah audit manajemen.

Audit manajemen ataupun pengawasan intern merupakan kebijakan dari prosedur spesifikasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen, bahwa sasaran dan tujuan penting bagi manajemen perusahaan dapat dipenuhi. Menurut Sukrisno Agoes (1996) manajemen audit adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Jadi, audit manajemen merupakan proses evaluasi dan efektivitas organisasi dan pembuatan laporan mengenai hasil dari evaluasi dengan merekomendasi untuk perbaikan. Menurut Alvin A Arens, Elder, J.Randal dan S.Mark (2008) efektivitas merujuk ke pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi mengacu ke sumber daya yang digunakan.

Adapun beberapa tahapan dalam audit manajemen menurut IBK Bayangkara (2011) antara lain : Audit Pendahuluan, Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen, Audit Terinci, Pelaporan dan Tindak Lanjut. Dengan adanya audit manajemen diharapkan dapat memperkecil

peluang terjadinya resiko pengembalian kredit. Oleh karena itu audit manajemen sangat diperlukan agar pemberian kredit dapat efektif.

Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Berkaitan dengan tujuan tersebut, titik berat audit diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang, di samping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian (IBK Bayangkara, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan audit manajemen untuk menilai efektivitas kegiatan Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen. Oleh karena itu penulis mengambil judul : **“Pengawasan Program Kredit Usaha Rakyat Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap audit internal dalam pengawasan di Kota Makassar pada pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar ?

2. Bagaimana review dan pengujian dalam pengawasan di Kota Makassar pada pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar

C. Tujuan Masalah

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tahap audit internal dalam pengawasan di Kota Makassar pada pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar
2. Untuk mengetahui review dan pengujian dalam pengawasan di Kota Makassar pada pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar

A. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan audit manajemen serta penerapan mengenai audit manajemen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi (rekomendasi perbaikan) terhadap masalah-masalah yang membuat pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani Kota Makassar berjalan kurang efektif serta menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen untuk senantiasa melakukan audit manajemen terhadap fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan.

b. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang audit khususnya audit manajemen dan diharapkan dapat berguna sebagai referensi yang bermanfaat dan dapat menjadi bahan kajian yang lebih mendalam bagi para peneliti lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Audit Manajemen

a. Pengertian Audit Manajemen

Fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen, menimbulkan aktivitas audit (pemeriksaan). Dari hasil audit dapat diketahui apakah laporan yang diberikan oleh manajemen sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi atau apakah operasi yang berjalan sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.

Siagian (2001) mendefinisikan audit manajemen sebagai suatu bentuk pemeriksaan yang bertujuan untuk meneliti dan menilai kinerja perusahaan yang disoroti dari sudut pandang peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja dalam berbagai komponennya. Audit manajemen merupakan salah satu alat yang digunakan manajemen untuk mengukur dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif, efisien, dan ekonomis (IBK Bayangkara, 2011).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit manajemen merupakan bentuk pemeriksaan untuk menilai, menganalisis, meninjau ulang hasil perusahaan, apakah telah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dan kemudian melaksanakan pengujian dan penelaan atas ketidakhematan maupun ketidakefektifan untuk

selanjutnya memberikan rekomendasi–rekomendasi perbaikan demi tercapainya tujuan perusahaan.

b. Tujuan Audit Manajemen

Tujuan audit manajemen adalah untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut (IBK Bayangkara, 2011: 3).

c. Ruang Lingkup dan Sasaran Audit Manajemen

Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan (IBK Bayangkara, 2011: 15).

Ruang lingkup audit manajemen meliputi:

- 1) Audit atas pertanggungjawaban keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penilaian apakah unit kerja:
 - a) Melaksanakan program yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
 - b) Mengelola penerimaan dan pengeluaran dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c) Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d) Menyelenggarakan pembukuan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e) Mengendalikan dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Audit atas kehematan dan daya guna mencakup penilaian unit kerja:
- a) Mengikuti praktik-praktik pengadaan barang/jasa yang sehat.
 - b) Mendapatkan jenis, kualitas, dan jumlah sumber daya yang diperlukan dengan biaya terendah yang wajar.
 - c) Melindungi dan memelihara sumber daya secara layak.
 - d) Menghindari adanya duplikasi kerja oleh beberapa petugas.
 - e) Menghindari terjadinya hal-hal yang mubazir.
 - f) Menggunakan metode kerja yang efisien.
 - g) Menggunakan sejumlah sumber daya yang minimum dalam memproduksi barang/jasa.
 - h) Menaati persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - i) Mempunyai sistem yang cukup baik dalam mengukur dan melaporkan kehematan dan daya guna pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Audit manajemen juga meliputi audit hasil guna (efektivitas) yang mencakup penilaian:
- a) Tujuan dan sasaran sudah sesuai, cocok, relevan dengan keinginan pembuat undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

- b) Sejauh mana hasil suatu program dan kegiatan mencapai suatu tingkat yang diinginkan.
- c) Pelaksanaan program telah diarahkan kepada penerima sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada saat perumusan program.
- d) Faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja telah diidentifikasi secara memuaskan.
- e) Manajemen telah mempertimbangkan alternatif pelaksanaan program yang mungkin dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih efektif.
- f) Program yang diperiksa merupakan komplemen, duplikasi, tumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain yang berkaitan.
- g) Cara-cara untuk membuat program agar lebih berhasil telah diidentifikasi secara memuaskan.
- h) Program yang diaudit telah mematuhi peraturan yang berlaku.

Sasaran dalam audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas, program dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan atau peningkatan, baik dari segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas (IBK Bayangkara, 2011).

d. Manfaat Audit Manajemen

Menurut Amin (2008) manfaat audit manajemen adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk mengambil keputusan.
- 2) Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-laporan dan pengendalian.
- 3) Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan, rencana-rencana, prosedur, serta persyaratan peraturan pemerintah.
- 4) Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil.
- 5) Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil pemborosan.
- 6) Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang ditetapkan.
- 7) Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi perusahaan.

e. Tahap-tahap Audit Manajemen

Lima tahapan audit manajemen menurut IBK Bayangkara (2011: 9-11) adalah sebagai berikut:

- 1) Audit Pendahuluan

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit yang dilakukan. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai

peraturan, ketentuan dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit. Auditor mungkin menggunakan daftar pertanyaan, *flow chart*, tanya jawab, laporan manajemen, dan observasi dalam pelaksanaan audit pendahuluan. Daftar pertanyaan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang memengaruhi efektivitas dan performa operasi. Auditor kemudian akan menilai jawaban yang diperoleh, kemudian auditor mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat jawaban yang diterima.

2) *Review* dan Pengujian Pengendalian Manajemen

Pada tahap ini auditor melakukan *review* dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit, dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit sehingga dengan lebih mudah dapat diketahui potensi-potensi terjadinya kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Jika dihubungkan dengan tujuan audit sementara yang telah dibuat pada audit pendahuluan, hasil pengujian pengendalian manajemen ini dapat mendukung tujuan audit sementara tersebut menjadi tujuan audit sesungguhnya, atau mungkin ada beberapa tujuan audit sementara yang gugur,

karena tidak cukup (sulit memperoleh) bukti-bukti yang mendukung tujuan audit tersebut.

3) Audit Terinci

Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan.

Temuan yang cukup, relevan, dan kompeten dalam tahap ini disajikan dalam suatu Kertas Kerja Audit (KKA) untuk mendukung kesimpulan audit yang dibuat dan rekomendasi yang diberikan. Kertas kerja dapat diorganisir berdasarkan subunit dari usaha yang diaudit (seperti berdasarkan cabang, bagian), urutan prosedur audit dilaksanakan (seperti audit pendahuluan, bukti) atau setiap sistem logis yang mempertinggi pemahaman auditor terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tujuan mengumpulkan bukti-bukti adalah untuk mendapatkan dasar faktual dalam menilai kriteria performa yang sebelumnya diidentifikasi.

4) Pelaporan

Tahapan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan.

5) Tindak Lanjut

Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan tersebut. Suatu rekomendasi yang tidak disepakati oleh objek audit akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tindak lanjutnya. Hasil audit menjadi kurang bermakna apabila rekomendasi yang diberikan tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit.

f. Prinsip Dasar dan Standar Audit Manajemen

IBK Bayangkara (2011: 5) menyatakan terdapat tujuh langkah prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam audit manajemen agar tujuan audit manajemen dapat tercapai dengan baik, diantaranya:

- 1) Audit dititikberatkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki sesuai dengan tujuan audit manajemen yaitu menciptakan perbaikan terhadap program/aktivitas perusahaan.
- 2) Persyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit.
- 3) Pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Hal ini dilakukan untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap objek yang diaudit.

- 4) Identifikasi individu yang bertanggungjawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Hal ini penting karena dengan mengetahui individu-individu tersebut akan lebih dalam dapat digali permasalahannya dan penyebab terjadinya kelemahan tersebut sehingga tindakan koreksi yang akan dilakukan menjadi lebih tepat dan lebih cepat.
- 5) Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggungjawab. Dalam hal ini auditor dapat memberikan berbagai pertimbangan dalam menentukan sanksi yang akan diberikan oleh pihak yang lebih tinggi dari petugas yang bersangkutan.
- 6) Pelanggaran hukum. Tidak tertutup kemungkinan auditor menemukan berbagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku seperti penipuan, penggelapan aset perusahaan maupun berbagai kegiatan yang secara sengaja merugikan perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- 7) Penyelidikan dan pencegahan kekurangan. Dalam hal ini auditor harus memberikan perhatian khusus dan melakukan penyelidikan yang lebih dalam sehingga kecurangan tidak terjadi.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada

UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

b. Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat

UMKM dan Koperasi yang membutuhkan kredit dapat menghubungi Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana. Mengajukan surat permohonan kredit/pembiayaan kemudian Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan (Bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit).

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Sawyer (2005: 211), berpendapat pengertian efektivitas yaitu: "Efektivitas menekankan hasil aktual dari dampak atau kekuatan untuk menghasilkan dampak tertentu. Sesuatu bisa jadi efektif tetapi tidak efisien dan ekonomis".

"Efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan atas pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan, pada dasarnya efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*" (Mardiasmo, 2004: 4).

“Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya” (IBK Bayangkara, 2011: 14).

Menurut IBK Bayangkara (2011: 24) untuk menilai efektivitas, auditor menekankan perhatiannya pada:

- 1) Pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.
- 2) Pemanfaatan hasil program.
- 3) Pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan program-program yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Efektivitas juga menjelaskan sejauh mana aktivitasaktivitas yang diselenggarakan berdasarkan program tersebut memberikan kontribusi bagi keberhasilan perusahaan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti efektivitasnya semakin tinggi.

Outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu efektivitas tertentu. *Outcome* seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai. Apabila suatu perusahaan telah berhasil mencapai tujuan, dalam hal ini target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan telah berjalan secara efektif.

b. Efektivitas Kegiatan Perkreditan

Secara umum dapat dikatakan bahwa efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan. Jika kita ingin untuk menilai efektivitas kegiatan perkreditan, maka kita dapat menilai apakah pelaksanaan kredit tersebut telah mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan aset bank yang berisiko karena dimiliki oleh pihak luar yaitu debitur. Dalam upaya untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perkreditan yang dijalankan bank maka bank harus menjamin bahwa kegiatan perkreditan telah berjalan dengan efektif di mana manajemen telah mampu mencapai sasaran kredit.

4. Prosedur Audit Manajemen atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat

a. Kegiatan Kredit Usaha Rakyat

Thomas Suyatno (2001) menyatakan sistem dan prosedur umum pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1) Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

- a) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
- b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- c) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
- d) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas kredit yang sedang berjalan.

2) Penyelidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyelidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a) Wawancara dengan pemohon kredit (debitur).
- b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah.
- c) Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lain yang diperoleh.
- d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan.

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
 - b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan atau permohonan kredit nasabah.
- 3) Keputusan atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus

memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan.

4) Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan permohonan dapat terjadi apabila:

- a) Penolakan permohonan kredit yang secara nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.
- b) Adanya keputusan penolakan dari direksi mengenai permohonan kredit.

5) Persetujuan Permohonan Kredit

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk menyetujui sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain: a) Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon; b) Peningkatan jaminan; c) Penandatanganan perjanjian kredit; d) Informasi untuk bagian lain; e) Pembayaran bea materai kredit; f) Asuransi barang jaminan; g) Asuransi kredit.

6) Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam praktiknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atau beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah,

bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa peningkatan jaminan dan penandatanganan perjanjian kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit. Apabila calon debitur telah memenuhi semua syarat dan prosedur kredit, maka bank akan menetapkan waktu kapan kredit tersebut dapat dicairkan.

Pada saat kredit akan dicairkan terlebih dahulu debitur akan menandatangani surat atas akta perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya. Surat Perjanjian Kredit (SPK) ini, dapat dibuat dibawah tangan atau dibuat di hadapan notaris, tergantung dari besar kecilnya kredit yang diberikan atau sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Lampiran dari SPK biasanya terdiri dari akta perikatan jaminan (hipotik, *fiducia*, atau gadai), surat kuasa penjual dan lain-lain.

7) Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Administrasi dan pembukuan kredit merupakan proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan pada suatu bank. Dari administrasi kredit ini, bank dapat memberikan pendapat sebagai alat dalam menunjang kegiatan-kegiatan dari proses perkreditan secara perorangan maupun secara keseluruhan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat dalam sistem dokumentasi perkreditan.

Dengan adanya administrasi kredit yang baik, dapat mempermudah laporan-laporan di bidang perkreditan baik

untuk kepentingan intern (kepentingan manajemen dan dewan komisaris) maupun untuk pihak eksteren (Bank Indonesia dan debitur).

Supervisi merupakan kegiatan yang dilakukan bank ketika bank telah memberikan pinjaman dana kepada nasabahnya. Kegiatan ini dilakukan bank sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan atas dana yang telah dipinjamkan. Bank harus memastikan bahwa kegiatan usaha nasabah mampu untuk menutupi pinjaman yang telah dicairkan bank, sehingga pembinaan dan pengawasan secara terus menerus harus dilakukan untuk menghindari munculnya kredit bermasalah atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta bunganya kepada bank.

b. Prosedur Audit Manajemen Atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2008: 5).

Jadi dari definisi di atas, prosedur audit manajemen atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen adalah suatu urutan kegiatan atau langkahlangkah audit manajemen yang dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen. Prosedur audit

manajemen tersebut dilakukan dengan melakukan tahapan-tahapan audit manajemen. Prosedur audit manajemen tersebut secara garis besar ialah sebagai berikut:

1) Survei

Survei dilakukan di BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen sebagai langkah awal audit pendahuluan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit yang akan dilakukan.

2) Menemukan masalah

Dari survei yang telah dilakukan, akan ditemukan hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada BRI tersebut yang menjadikan kegiatan pemberian Kredit Usaha Rakyat belum berjalan secara efektif.

3) Melakukan audit manajemen atas pemberian Kredit Usaha

Rakyat di BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen

Pada tahap prosedur ini, dilakukan dengan observasi yaitu dengan pengamatan langsung kepada subjek yang terlibat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Data diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan sumber data primer yakni pihak-pihak yang berkompeten dalam kegiatan pemberian Kredit Usaha Rakyat tersebut. Dari hasil wawancara tersebut, terdokumentasi dengan program-program audit yang menjadi suatu rencana dan

langkah kerja yang harus dilakukan selama audit manajemen dilakukan.

4) Audit Terinci

Tahap prosedur ini dilakukan dengan menentukan kondisi, kriteria, mendeskripsikan penyebab dan menjelaskan akibat.

5) Mengadakan evaluasi

Evaluasi ini dilakukan dengan meneliti kembali hasil audit yang telah diperoleh dan menarik kesimpulan dari prosedurprosedur audit manajemen yang telah dilakukan.

6) Rekomendasi

Aktivitas yang dinilai kurang efektif memerlukan perbaikan sehingga harus ada rekomendasi yang nantinya akan ada perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada BRI tersebut.

7) Efektif

Dengan tindak lanjut yang dilakukan yaitu mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, maka pemberian Kredit Usaha Rakyat bisa berjalan efektif.

B. Penelitian yang Relevan

1. Voni Astari (2011) melakukan penelitian tentang peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan di Bank Nagari Cabang Utama Padang. Audit operasional dibatasi dengan pelaksanaan pemeriksaan atas kegiatan perkreditan Bank Nagari

Cabang Utama Padang dalam menyalurkan Kredit Modal Kerja dan peranannya dalam meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Modal Kerja.

Hasil penelitiannya adalah sebaiknya audit operasional tidak hanya dilakukan satu kali dalam setahun mengingat perkreditan merupakan kegiatan utama di bank dan mengandung banyak resiko.

Penelitian yang dilakukan Voni Astari relevan dengan penelitian ini karena penelitian ini sama-sama dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas perkreditan di bank. Relevansi terdapat dalam hal tujuan penelitian.

Perbedaannya adalah, pada penelitian Voni Astari yang dilakukan adalah audit operasional sedangkan pada penelitian ini adalah audit manajemen. Selain itu, objek penelitiannya dikhususkan pada Kredit Modal Kerja di Bank Nagari Cabang Utama Padang sedangkan objek penelitian ini dikhususkan pada Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen.

2. Elvira Bartholomeus Tampang (2011) melakukan audit manajemen pada fungsi keuangan di PT Tirta Makna Bahagia. Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa kurang efektif dan efisiennya fungsi manajemen keuangan pada PT Tirta Makna Bahagia.

Hasil dari penelitiannya antara lain sebaiknya perusahaan melakukan pemisahan jabatan yang dirangkap oleh satu orang dengan menambah jumlah karyawan. Perusahaan juga harus mengoptimalkan penggunaan komputer untuk mempercepat proses pengiriman data keuangan. Perbaikan yang direkomendasikan dalam penelitiannya terpusat pada perbaikan sistem karyawan dan teknologi.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama berkaitan dengan audit manajemen. Perbedaannya adalah fungsi-fungsi yang diteliti. Pada penelitian Elvira, sasaran fungsi utamanya adalah fungsi keuangan, sedangkan pada penelitian ini sasarannya adalah keefektifan suatu kegiatan, yaitu kegiatan pemberian Kredit Usaha Rakyat.

C. Kerangka Berpikir

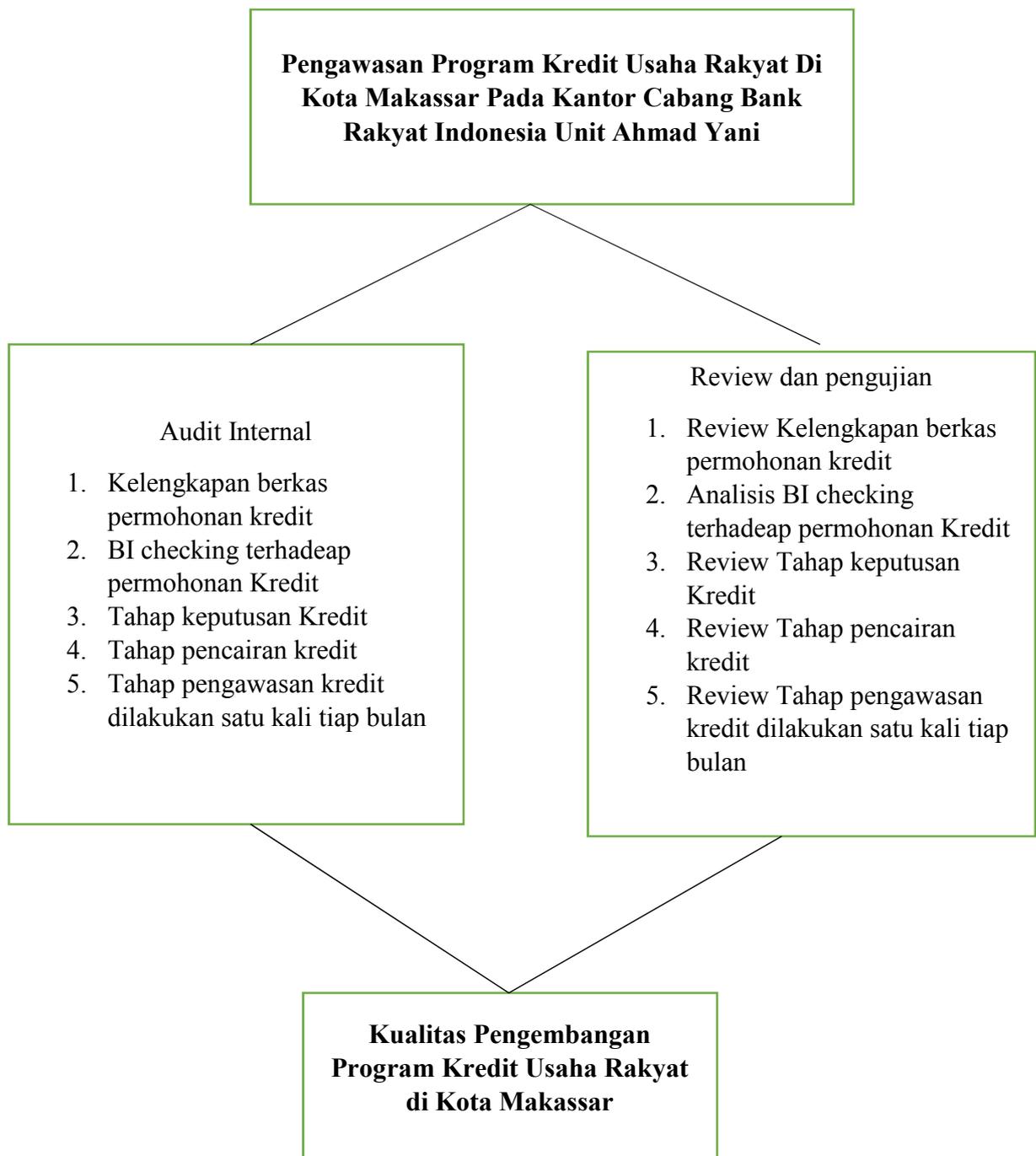
Audit manajemen merupakan suatu penilaian dan pengkajian atas tiap-tiap prosedur dan metode yang ditetapkan pada perusahaan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas kegiatan perusahaan guna memperbaiki kinerja manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan.

Kegiatan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen memiliki prosedur yang harus dilakukan dengan baik sehingga kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Peranan audit manajemen inilah yang dapat membantu kinerja manajemen dalam mengevaluasi kinerja manajemen agar perusahaan dapat berjalan secara efektif yang akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas perusahaan.

D. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah alur sederhana yang mendeskripsikan pola hubungan variabel penelitian atau prosedur kerja penelitian untuk memecahkan masalah (Ismani, dkk. 2007: 18). Dari definisi di atas, maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada pengawasan dalam bentuk pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Makassar pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani

C. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Audit internal

- a. Permohonan kredit dilakukan kepada calon nasabah dalam melakukan kelengkapan berkas untuk menghindari suatu kecurangan yang akan dilakukan pada calon debitur Kur.
 - b. Dalam analisis kredit bertujuan untuk mengecek kembali kepada calon nasabah tersebut apakah [ernah melakukan kredit macet terhadap instansi lain
 - c. Dalam tahap ini bertujuan menentukan dalam kelauakan dalam menerima pembiayaan program kur tersebut yang dilakukan sbeelum memberikan keputusan [encairan kredit terhadap calon debitur
 - d. Dalam pencairan kredit bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali pada calon nasabah yang telah disepakati berkasnya.
 - e. Dalam pengawasan kredit bertujuan untuk mengontrol usaha produktif tersebut yang telah diberikan modal usaha program Kur
2. Didalam suatu program KUR di makassar agar tidak dapat melenceng dari target sasaran yang sebenarnya, maka sangat penting dilakukan review oleh kepada Cabang Pimpinan Bank Bri unit Ahmad Yani dalam audit internal ini untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BRI Unit Kuwarasan, Kecamatan Gombang, Kebumen. Penelitian dilakukan pada tanggal 20 Januari sampai 20 Februari 2013.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu Audit Manajemen atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat. Adapun definisi operasional variabel audit manajemen atas pemberian Kredit Usaha Rakyat adalah bentuk pemeriksaan untuk menilai, menganalisis, meninjau ulang hasil program Kredit Usaha Rakyat, apakah telah berjalan secara efektif, serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dan kemudian melaksanakan pengujian dan penelaahan atas ketidakhematan maupun ketidakefektifan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi–rekomendasi perbaikan demi tercapainya tujuan BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan program pemberian Kredit Usaha Rakyat yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian tujuan BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen. Efektivitas juga menjelaskan sejauh mana aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan berdasarkan program pemberian Kredit Usaha Rakyat tersebut memberikan kontribusi bagi keberhasilan BRI Unit Kuwarasan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti efektivitasnya semakin tinggi.

C. Jenis Penelitian

Penelitian adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari suatu proposisihipotesis mengenai hubungan tertentu antarfenomena (Kerlinger, Fred N, 1986).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana penelitian dilakukan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen mengenai audit manajemen untuk menilai efektivitas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penulis berusaha mengumpulkan data dengan keadaan sebenarnya, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki mengenai situasi yang sebenarnya dari objek penelitian.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Sebagai contoh jawaban dari pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berwenang untuk memberikan data dan informasi dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang dikumpulkan penulis adalah hasil wawancara dengan Kepala Unit dan Mantri BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh sehubungan dengan perusahaan yang telah terdokumentasi, seperti struktur organisasi perusahaan, prosedur pemberian kredit, dan data kelengkapan lainnya.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat, yaitu *Customer Service*, *Teller*, Mantri dan Kepala Unit. Objek dari penelitian ini adalah kegiatan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah, pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah (Heru Basuki, 2006).

Observasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung kepada subjek yang terlibat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat untuk mengamati pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen, yaitu Kepala Unit dan Mantri BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa program-program audit. Program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit, yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program/aktivitas yang diaudit (IBK Bayangkara, 2011).

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa program audit dan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara.

1. Program Audit

Program audit untuk pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen (terlampir) terdiri dari: a. Program Audit - Audit Pendahuluan.

b. Program Audit - Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen.

c. Program Audit - Audit Terinci.

2. Daftar Pertanyaan Wawancara

a. Bagaimana struktur organisasi pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen?

b. Bagaimanakah tugas dan wewenang masing-masing jabatan terkait dengan program Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen?

c. Bagaimana tahapan pemberian Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen?

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan audit manajemen sesuai dengan tahapan-tahapan audit manajemen. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Audit Pendahuluan

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit yang dilakukan. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit.

2. *Review* dan Pengujian Pengendalian Manajemen

Tujuan tahapan ini adalah untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

3. Audit Terinci

Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan. Pada tahapan ini penulis akan mengidentifikasi data-data yang diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam empat elemen dalam tujuan audit, yaitu:

a. Mendeskripsikan kondisi (*condition*)

Mendeskripsikan kondisi yaitu menggambarkan keadaan riil dari program atau aktivitas pemberian Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen.

b. Menentukan kriteria (*criteria*)

Menentukan kriteria yaitu menentukan standar atau norma yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya pihak-pihak dalam organisasi melakukan aktivitasnya sebagai pertanggungjawaban atas wewenang yang dilimpahkan dan menjadi tolok ukur kinerja organisasi sehingga dengan adanya kriteria dapat ditentukan kondisi organisasi sesuai dengan standar atau tidak. Standar yang digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan pemberian Kredit Usaha Rakyat adalah Surat Edaran Direksi Nose. S. 09DIR/ADK/03/2010, Surat Kanpus BRI No:B.578-PRG/KPL/10/2010, dan tercapai atau tidaknya target Kredit Usaha Rakyat pada periode 2012.

c. Mendeskripsikan penyebab (*cause*)

Causes atau penyebab merupakan seluruh tindakan manajerial ataupun operasional dari pengelola organisasi yang menimbulkan terjadinya penyimpangan antara rencana dengan realisasi. Semua aktivitas atau tindakan tersebut akan diperbandingkan dengan kondisi sehingga dapat diketahui penyebab dari suatu kondisi tertentu dalam organisasi.

d. Menentukan akibat (*effect*)

Menentukan akibat yaitu menentukan sesuatu yang harus ditanggung oleh organisasi pelaksana karena perbedaan antara aktivitas riil dengan aktivitas yang seharusnya.

4. Pelaporan

Tahapan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil audit berupa hasil *review* dan pengujian pengendalian manajemen dan hasil audit terinci untuk menilai keefektifan pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen. Penilaian keefektifan mengacu pada sejauh mana prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat berjalan sesuai dengan prosedurnya atau kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian juga mencakup sejauh mana kelemahan yang ditemukan mempengaruhi akibat. Hal itulah yang akan menjadikan apakah pemberian Kredit Usaha Rakyat berjalan efektif atau tidak.

Selain itu, dalam pelaporan juga terdapat rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

5. Tindak lanjut

Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Meskipun tahapan audit manajemen setelah pelaporan adalah tindak lanjut yang bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindakan-tindakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi dalam penelitian ini, tahapan audit manajemen yang dilakukan oleh peneliti hanya sampai tahapan pelaporan yang berisi laporan hasil audit manajemen mengenai efektivitas program

pemberian Kredit Usaha Rakyat dan pemberian rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan penulis tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti. Rekomendasi didiskusikan dengan manajemen BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen dan manajemenlah yang berwenang untuk menindaklanjutinya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Audit Pendahuluan Atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit yang dilakukan. Pada tahap audit pendahuluan ini didapatkan informasi mengenai BRI secara umum (*kondisi/condition*) dan informasi mengenai BRI secara khusus (*kriteria/criteria*), yang meliputi:

- a. Deskripsi Data Umum Perusahaan, yang terdiri dari:
 - 1) Sejarah singkat Bank Rakyat Indonesia.
 - 2) Visi dan misi Bank Rakyat Indonesia.
 - 3) Struktur Bank Rakyat Indonesia.
- b. Deskripsi Data Khusus Perusahaan, yang terdiri dari:
 - 1) Struktur organisasi BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen.
 - 2) Tugas dan wewenang masing-masing jabatan.
 - 3) Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen.

2. *Review* dan Pengujian Pengendalian Manajemen Atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen

Tahap *review* dan pengujian pengendalian manajemen atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen Kredit Usaha Rakyat dalam mendukung pencapaian tujuan BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen dengan mengetahui bagaimana pengendalian internal pada setiap tahapan pemberian Kredit Usaha Rakyat.

Hasil *review* dan pengujian pengendalian manajemen dianalisis berdasarkan program audit (yang tertera dalam lampiran) meliputi:

- a. Dilakukan pengecekan ulang setelah registrasi calon debitur oleh *Customer Service*.
- b. Mantri melakukan BI *checking* terhadap identitas calon debitur.
- c. Mantri mencocokkan fotokopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya saat survei.
- d. Mantri menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur Kredit Usaha Rakyat saat survei.
- e. Mantri menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur Kredit Usaha Rakyat saat survei.
- f. Mantri mencocokkan Surat Keterangan Usaha dengan usaha yang sesungguhnya di lapangan pada saat survei lapangan.
- g. Mantri menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur Kredit Usaha Rakyat saat survei.

- h. Kepala Unit meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan masih berlaku, lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.
- i. Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas Kredit Usaha Rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit.
- j. Kepala Unit memeriksa nominal angsuran pada formulir permohonan calon debitur.
- k. Kepala Unit memeriksa jangka waktu pinjaman yang tertera pada formulir permohonan calon debitur.
- l. Kepala Unit memeriksa plafon pinjaman (jumlah pinjaman) pada formulir permohonan calon debitur.
- m. Kepala Unit memeriksa kembali berkas-berkas yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat saat pencairan kredit.
- n. *Teller* memeriksa kembali jumlah nominal uang yang diberikan dengan jumlah nominal uang yang tertera pada Surat Permohonan Pinjaman KUR.
- o. *Teller* memeriksa kembali jumlah nominal uang yang diberikan dengan jumlah nominal uang yang tertera pada Surat Permohonan Pinjaman KUR.
- p. Ada pertemuan rutin yang dilakukan untuk pembahasan rencanarencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan program KUR.
- q. Sering dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kredit Usaha Rakyat pada debitur yang memanfaatkan program tersebut.

- r. Pernah dilakukan audit manajemen khususnya untuk program pemberian KUR di BRI Unit Kuwarasan.

3. Audit Terinci

Audit terinci atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti yang cukup kompeten untuk mendukung tujuan audit. Hasil dari audit terinci yang dilakukan oleh penulis di BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen adalah sebagai berikut. a. Tahap Permohonan Kredit

1) Kondisi

Calon debitur yang akan mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat, mengajukan surat permohonan ke *Customer Service* BRI Unit Kuwarasan dengan membawa kelengkapan identitas. *Customer Service* memeriksa kelengkapan identitas yang berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, dan Surat Keterangan Usaha, sedangkan calon debitur mengisi formulir permohonan Kredit Usaha Rakyat dan ditandatangani.

Beberapa administrasi terjadi kesalahan seperti adanya KTP yang sudah mati ataupun ketidakbenaran usaha yang dimiliki oleh calon debitur.

2) Kriteria

- a) Persyaratan administratif bagi calon debitur:

(1) Menyerahkan fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta dicocokkan dengan aslinya.

(2) Menyerahkan ijin usaha atau penggantinya sesuai dengan yang tertera pada identitas.

b) Dokumen yang dihasilkan:

(1) Formulir keterangan permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat.

(2) Berkas-berkas fotokopi identitas diri berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha.

3) Penyebab

Beberapa kelalaian *Customer Service* ditemukan pada saat registrasi/permohonan kredit, khususnya pada kelengkapan dan keaslian berkas-berkas fotokopi identitas diri yang berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha yang diberikan oleh calon debitur kepada *Customer Service*.

4) Akibat

Kesalahan yang paling banyak dijumpai adalah adanya KTP dari calon debitur yang sudah mati namun *Customer Service* tetap meloloskan administrasi tersebut. Selain itu, usaha calon debitur ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Akibat dari kelalaian itu adalah Mantri/*Account*

Officer saat melakukan survei lapangan, Mantri harus mengulang pemeriksaan dari awal karena data dari *Customer Service* tidak sesuai dengan persyaratan. Waktu yang digunakan menjadi kurang efektif.

b. Tahap Analisis Kredit/Pemeriksaan

1) Kondisi

Setelah syarat-syarat dan berkas-berkas dilengkapi, Mantri (*Account Officer*) melakukan *BI checking* atas nama calon debitur tersebut. Jika calon debitur memiliki riwayat yang baik dalam hal pinjaman, maka Mantri akan melakukan survei. Namun, jika calon debitur memiliki riwayat yang kurang baik (*blacklist*) maka secara langsung permohonan pinjaman calon debitur tersebut ditolak.

Mantri akan melakukan survei secara langsung ke lapangan untuk mengetahui layak atau tidaknya calon debitur tersebut menerima pinjaman. Survei juga dilakukan untuk memeriksa keaslian identitas dari calon debitur.

Ada beberapa temuan seperti adanya permohonan dari *Customer Service* tidak sesuai dengan analisisnya. Selain itu terdapat beberapa kali kesalahan analisis yang dilakukan oleh Mantri. Saat survei lapangan, Mantri menganalisis pendapatan usaha calon debitur.

2) Kriteria

- a) Mantri mencocokkan fotokopi bukti diri/identitas lain (fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha) sesuai dengan aslinya.
- b) Mantri menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
- c) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.

3) Penyebab

- a) Kelalaian *Customer Service* yang meloloskan calon debitur dengan administrasi yang tidak sesuai dengan persyaratan.
- b) Kelalaian Mantri/*Account Officer* dalam melakukan analisis pendapatan calon debitur yang seharusnya lebih dari 75% dari pendapatan usaha calon debitur.

4) Akibat

Adanya kelalaian dari *Customer Service* maupun Mantri tersebut akan mengurangi keefektifan waktu yang digunakan karena akan terjadi pengulangan pekerjaan analisis yang harus dilakukan oleh Kepala Unit.

c. Tahap Pemberian Putusan Kredit

1) Kondisi

Setelah analisis yang dilakukan oleh Mantri dan hasilnya diserahkan kepada Kepala Unit, pihak BRI Unit Kuwarasan akan mengkonfirmasikannya kepada calon debitur. Kepala Unit akan memastikan dokumen-dokumen pendukung keputusan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, Surat Keterangan Usaha, dan formulir permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat.

2) Kriteria

a) Analisis yang dilakukan telah memenuhi syarat 5C. Syarat tersebut adalah:

(1) *Character* yaitu sifat dari calon debitur untuk mengetahui sejauh mana calon debitur memiliki kemauan dan itikad untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman.

(2) *Capacity* yaitu menganalisis kemampuan calon debitur dalam melangsungkan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Hal ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur membayar angsuran dengan tepat waktu.

(3) *Capital* yaitu jumlah modal sendiri yang dimiliki calon debitur. Hal ini berfungsi sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam melangsungkan usahanya karena ikut menanggung resiko dalam kegagalan usahanya.

(4) *Collateral* yaitu barang-barang yang diserahkan calon debitur sebagai jaminan kredit yang diterimanya. Maka

dari itu sebelumnya, pengikatan harus diteliti dari segi yuridisnya yaitu apakah barang-barang yang dijaminakan itu (berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, dan Surat Keterangan Usaha) masih berlaku, lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

(5) *Condition of economy* yaitu keadaan ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi kelangsungan usaha calon debitur yang pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuannya dalam membayar kewajibannya.

- b) Berkas-berkas pendukung pemberian Kredit Usaha Rakyat (berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha) masih berlaku, lengkap, sah dan berkekuatan hukum.
- c) Dokumen yang dihasilkan adalah formulir keterangan permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat yang telah ditandatangani oleh Mantri dan Kepala Unit.

3) Penyebab

Pemberian putusan kredit mempertimbangkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya yaitu pada tahap permohonan kredit dan tahap analisis/pemeriksaan kredit.

4) Akibat

Pemberian putusan kredit yang tepat mencerminkan adanya kelayakan kredit yang diberikan kepada calon debitur

berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

d. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit

1) Kondisi

Saat putusan pemberian kredit telah dikeluarkan, *Customer Service* menyiapkan semua syarat-syarat (berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, Surat Keterangan Usaha, dan formulir permohonan Kredit Usaha Rakyat yang telah diisi) yang harus diserahkan oleh Kepala Unit sebelum Kredit Usaha Rakyat tersebut dicairkan. Kondisi yang sering ditemukan adalah adanya kesalahan penulisan nominal pada berkas-berkas pendukung pencairan kredit yang dibuat oleh *Customer Service* yang berupa kwitansi-kwitansi (kwitansi pembayaran, kwitansi pinjaman, dan kwitansi materai) sebagai syarat sebelum kredit dicairkan.

2) Kriteria

Dokumen yang harus dipersiapkan dan diisi lengkap sebagai persyaratan pencairan kredit adalah: a) Kwitansi pembayaran

b) Kwitansi pinjaman.

c) Kwitansi materai.

d) Surat Pengakuan Hutang yang telah ditandatangani Kepala Unit.

e) Rekening pinjaman.

f) Formulir permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat yang telah ditandatangani oleh Mantri dan Kepala Unit yang selanjutnya diserahkan ke *Teller* untuk pencairan Kredit Usaha Rakyat.

3) Penyebab

Adanya kesalahan nominal uang saat penyerahan berkasberkas pendukung (kwitansi pembayaran, kwitansi pinjaman, kwitansi materai, surat pengakuan hutang, rekening pinjaman, dan formulir permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat) ke *Teller* yang akan dicairkan.

4) Akibat

Adanya pengulangan pekerjaan yaitu pengecekan ulang berkas-berkas pendukung Kredit Usaha Rakyat yang mengakibatkan penggunaan waktu yang kurang efektif.

e. Tahap Pengawasan Kredit

1) Kondisi

Tujuan dari dilakukannya pengawasan kredit adalah agar program pemberian Kredit Usaha Rakyat bisa berjalan sesuai prosedur dan dapat berjalan efektif serta mampu mencapai target tahunan yang telah ditetapkan saat perencanaan tahunan. Pengawasan lebih banyak dilakukan oleh Kepala Unit dan

dibantu oleh masing-masing jabatan yang berkaitan dengan program pemberian Kredit Usaha Rakyat.

Di BRI Unit Kuwarasan tidak terdapat kredit macet karena selalu ada penagihan yang dilakukan oleh Mantri. Ada batasan pembayaran, yakni 270 hari, jika sudah melewati batas hari diberikan surat penjaminan yang selanjutnya akan dijaminan oleh perusahaan penjamin.

Karena adanya pengawasan yang baik serta masing-masing jabatan melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, BRI Unit Kuwarasan dalam hal Kredit Usaha Rakyat telah mencapai target nominal Kredit Usaha Rakyat (Rp 2.486.764.000,00) dan target debitur (364 debitur).

2) Kriteria

- a) Kepala Unit melakukan pertemuan rutin dengan pegawai Kredit Usaha Rakyat BRI Unit Kuwarasan untuk membahas rencana-rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat.
- b) Adanya peneguran tapi bukan denda ataupun somasi yang akan dilakukan oleh pihak BRI jika terdapat debitur yang lalai dalam pembayaran angsuran pinjaman.
- c) Ada pengawasan terhadap pengelolaan Kredit Usaha Rakyat pada debitur yang memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat.
- d) Ada pembinaan dengan pengarahan pinjaman Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan untuk modal usaha.

3) Penyebab

Masing-masing pegawai memahami dan melakukan tugas serta wewenangnya dengan baik dalam program pemberian Kredit Usaha Rakyat. Pengawasan dari Kepala Unit telah berjalan dengan baik.

4) Akibat

Tercapainya target nominal dan target debitur tahunan pada periode 2012 mencerminkan adanya pengawasan kredit yang telah dilakukan dengan baik.

B. Pembahasan

1. Audit Pendahuluan Atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Ahmad Yani

a. Deskripsi Data Umum Perusahaan

Deskripsi data umum perusahaan berikut merupakan data yang diperoleh dalam tahapan audit pendahuluan, yang meliputi:

1) Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia

Awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia/pribumi). Bank Rakyat Indonesia berdiri tanggal 16 Desember 1895. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1

menyebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Akibat situasi perang pada tahun 1948 kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti dan aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM).

Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu tahun, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit I Bidang Rural sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Indonesia Unit II Bidang Ekspor Impor (<http://www.bri.co.id>, diunduh pada tanggal 1 Februari 2013).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank

yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

2) Visi dan misi Bank Rakyat Indonesia.

a) Visi

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

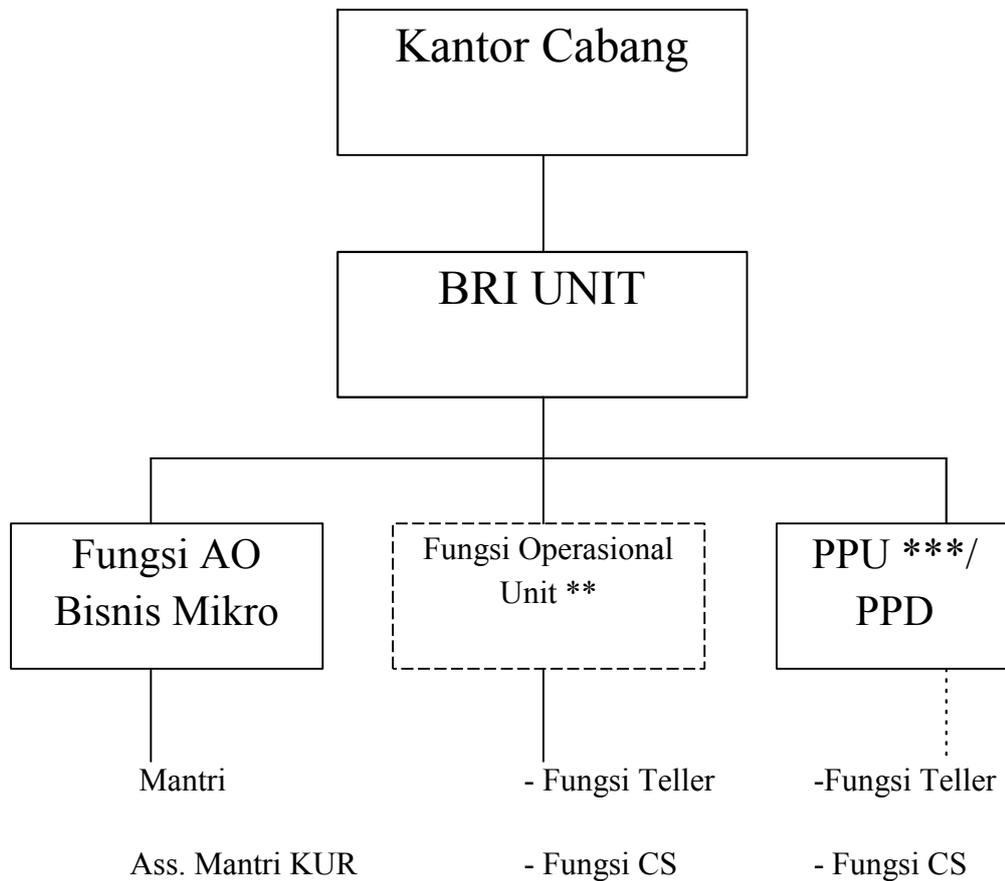
b) Misi

(1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

(2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktik *good corporate governance*.

(3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3) Struktur Bank Rakyat Indonesia.

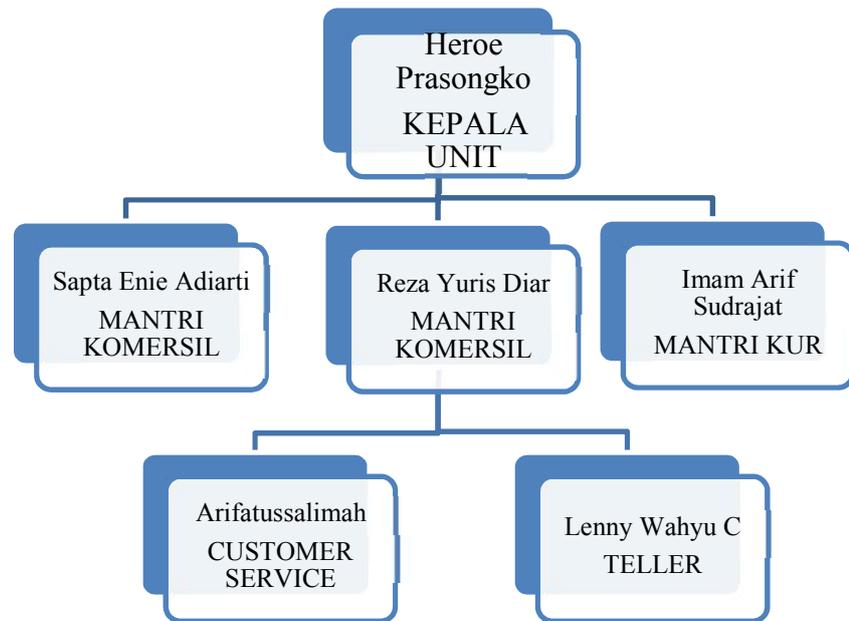


Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia

b. Deskripsi Data Khusus Perusahaan

Deskripsi data khusus perusahaan berikut merupakan data yang diperoleh dalam tahapan audit pendahuluan, yang meliputi:

1) Struktur Organisasi BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi
BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar

2) Tugas dan Wewenang Masing-masing Jabatan

a) Kepala BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar

Nama : Heroe Prasongko Tugas :

- (1) Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai target.
- (2) Melaksanakan pembinaan nasabah BRI Unit baik pinjaman maupun simpanan.

Wewenang :

- (1) Memutus permintaan KUR, Kupedes, dan BRInet sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (2) Memutus biaya promosi.
- (3) Memfiat pencairan/penarikan simpanan.
- (4) Melakukan fiat bayar pinjaman yang telah diputus.

b) Mantri

Nama :

- (1) Sapta Enie Adiarti (Mantri Komersil).
- (2) Reza Yuris Diar (Mantri Komersil).
- (3) Imam Arif Sudrajat (Mantri KUR).

Tugas :

- (1) Melaksanakan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya).
- (2) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
- (3) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.

Wewenang :

- (1) Memprakarsai permintaan pinjaman.
- (2) Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman.

c) *Customer Service*

Nama : Arifatussalimah

Tugas :

- (1) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI.
- (2) Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk BRI Unit.

- (3) Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan pinjaman BRI Unit dan simpanan serta jasa bank.

d) *Teller*

Nama : Lenny Wahyu C

Tugas :

- (1) Memberikan pelayanan transaksi kas ataupun *overbooking*, serta memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis BRI sesuai dengan sistem yang jelas dan prosedur operasional BRI.
 - (2) Memberikan pelayanan transaksi kas baik penerimaan setoran, pengambilan maupun pembayaran dari dan ke nasabah atau calon nasabah.
 - (3) Melakukan pengurusan kas BRI Unit bersama Kepala Unit untuk mengamankan asset bank.
 - (4) Melakukan kegiatan pemeriksaan fisik uang untuk memastikan keaslian uang yang diterima.
- 3) Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit
Ahmad Yani Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong yang dilakukan serta hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Mantri (*Account Officer/AO*), Reza Yuris Diar, SH pada hari Sabtu, 26 Januari

2013, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

a) Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI Unit Kuwarasan, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon (hasil wawancara dengan Reza Yuris Diar, SH selaku Mantri BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar Sabtu, 26 juni 2017).

Calon debitur Kredit Usaha Rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha.

b) Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan

BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar dalam melakukan analisis kredit mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan Keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Kuwarasan dalam hal ini Mantri (*Account Officer*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur Kredit Usaha Rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain:

- (1) Mencocokkan fotokopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya.
- (2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur Kredit Usaha Rakyat. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
- (3) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur Kredit Usaha Rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman (hasil wawancara dengan Reza Yuris Diar, SH selaku Mantri/*Account Officer* BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar Senin, 28 Juni 2017

c) Tahap Pemberian Putusan Kredit

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian Kredit Usaha Rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Kuwarasan akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan tiga sampai lima hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat (hasil wawancara dengan Reza Yuris Diar, SH selaku Mantri/*Account Officer* BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar Senin, 28 Juni 2017)

Pada BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Kuwarasan wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

d) Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit.

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian KUR diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *Teller* BRI Unit Ahmad Yani

Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit (hasil wawancara dengan Reza Yuris Diar, SH selaku Mantri/*Account Officer* pada BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar Senin, 28 Juni 2017

2. *Review* dan Pengujian Pengendalian Manajemen Atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar

Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui empat tahapan dan satu tahap pengawasan yang di dalamnya telah dilakukan beberapa pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan BRI. Hal tersebut ditunjukkan dengan tahapan *review* dan pengujian pengendalian manajemen yang telah dilakukan peneliti dengan pembahasan sebagai berikut:

- a. Pada tahap permohonan kredit, *Customer Service* telah melakukan pengecekan ulang atas fotokopi KTP, fotokopi KK, dan Surat Keterangan Usaha calon debitur. Pernah ditemukan adanya administrasi yang tidak sesuai dengan persyaratan, yakni adanya KTP yang sudah mati dan Surat Keterangan Usaha yang ternyata setelah dilakukan survei, usaha yang ada tidak sesuai dengan suratnya. Namun, dengan adanya pengecekan ini, kelemahan tersebut bisa ditangani, sehingga pada tahap selanjutnya administrasi telah sesuai dengan persyaratan.

- b. Pada tahap analisis kredit, Mantri telah melakukan BI *checking* terhadap riwayat pinjaman calon debitur untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki riwayat pinjaman yang baik atau tidak.
- c. Mantri telah mencocokkan fotokopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya saat survei.
- d. Mantri menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur Kredit Usaha Rakyat saat survei. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
- e. Mantri menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur Kredit Usaha Rakyat saat survei. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki kemampuan membayar pinjaman atau tidak.
- f. Mantri mencocokkan Surat Keterangan Usaha dengan usaha yang sesungguhnya di lapangan pada saat survei lapangan.
- g. Mantri juga menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur Kredit Usaha Rakyat saat survei.
- h. Pada tahap pemberian putusan kredit, Kepala Unit telah meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan masih berlaku, lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.
- i. Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas Kredit Usaha Rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit.
- j. Kepala Unit memeriksa nominal angsuran pada formulir permohonan calon debitur.

- k. Kepala Unit memeriksa jangka waktu pinjaman yang tertera pada formulir permohonan calon debitur.
- l. Kepala Unit memeriksa plafon pinjaman (jumlah pinjaman) pada formulir permohonan calon debitur.
- m. Kepala Unit memeriksa kembali berkas-berkas yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat saat pencairan kredit.
- n. Pada tahap pencairan kredit, *Teller* telah memeriksa kembali jumlah nominal uang yang diberikan dengan jumlah nominal uang yang tertera pada Surat Permohonan Pinjaman KUR.
- o. *Teller* memeriksa kembali jumlah nominal uang yang diberikan dengan jumlah nominal uang yang tertera pada Surat Permohonan Pinjaman KUR.
- p. Untuk mengawasi dan menguji pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen, ada pertemuan rutin yang dilakukan untuk pembahasan rencanarencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan program KUR.
- q. Selain itu, dilakukan pula pengawasan terhadap pengelolaan Kredit Usaha Rakyat pada debitur yang memanfaatkan program tersebut.
- r. Untuk menilai keefektifan pemberian Kredit Usaha Rakyat, pernah dilakukan audit manajemen di BRI Unit Ahmad Yani .

3. Audit Terinci

a. Tahap Permohonan Kredit

Pelaksanaan tahapan permohonan kredit telah berjalan secara efektif dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun, terdapat beberapa temuan kesalahan di tahap permohonan kredit pada BRI

Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen yakni adanya beberapa kelalaian administrasi oleh *Customer Service* tentang keaslian usaha maupun tentang kelengkapan identitas calon debitur.

Hal ini tidak menghambat prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat karena Mantri akan mengecek kembali saat dilakukannya survei lapangan. Namun, hal ini dapat berdampak pada keterlambatan proses survei lapangan yang dilakukan oleh Mantri.

Dokumen yang dihasilkan pada tahapan ini adalah formulir keterangan permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat dan berkas-berkas fotokopi identitas diri berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha.

Hasil dari tahapan ini diserahkan kepada Mantri untuk diperiksa kembali yang selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap analisis kredit/pemeriksaan.

b. Tahap Analisis Kredit/Tahap Pemeriksaan

Pelaksanaan tahapan analisis kredit yang dilakukan oleh Mantri pada BRI Unit Kuwarasan telah berjalan efektif. Namun, masih terdapat kelemahan. Kelemahan terletak pada perbedaan permohonan yang telah diperiksa oleh *Customer Service* dengan keadaan sebenarnya saat survei lapangan. Kelemahan lainnya adalah adanya kesalahan analisis perhitungan yang dilakukan oleh Mantri sebelum berkas-berkas (fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, hasil analisis yang telah dilakukan oleh Mantri, dan formulir permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat) diserahkan kepada Kepala Unit untuk disetujui.

Hal ini tidak menghambat prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat karena hasil dari Mantri diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk pemberian putusan Kredit.

c. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Pelaksanaan tahapan pemberian putusan kredit pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen telah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Berkas-berkas hasil survei dan analisis yang telah dilakukan oleh Mantri diserahkan kepada Kepala Unit dan diperiksa serta dianalisis kembali perhitungan yang telah dilakukan oleh Mantri.

Dokumen yang dihasilkan dari tahapan ini adalah formulir keterangan permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat yang telah ditandatangani oleh Mantri dan Kepala Unit yang kemudian diserahkan kepada *Customer Service* untuk pembuatan berkasberkas selanjutnya (kwitansi pembayaran, kwitansi pinjaman, kwitansi materai, Surat Pengakuan Hutang, dan rekening pinjaman).

d. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit

Pelaksanaan tahapan pencairan/akad kredit pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen telah berjalan secara efektif. Namun, ada satu kesalahan yang pernah ditemukan yaitu adanya kesalahan penyerahan uang kepada debitur yang nominalnya tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada surat keterangan

permohonan pinjaman. Namun, hal tersebut tidak menghambat proses pemberian Kredit Usaha Rakyat karena Kepala Unit akan memeriksa kembali nominal yang akan diserahkan kepada debitur.

Dokumen yang dihasilkan pada tahapan ini adalah kwitansi pembayaran, kwitansi pinjaman, kwitansi materai, surat pengakuan hutang yang telah ditandatangani Kepala Unit, rekening pinjaman yang langsung dibuat oleh *Customer Service*, serta berkas-berkas (formulir permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat) yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Unit yang kemudian diserahkan ke *Teller*.

e. Tahap Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit perlu dilakukan agar Kredit Usaha Rakyat berjalan sesuai dengan prosedurnya dan dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan oleh BRI. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen telah berjalan efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari tercapainya target nominal dan target debitur tahunan yang telah ditetapkan oleh BRI. Selain itu kinerja yang baik dari masing-masing pegawai menunjukkan adanya pemahaman yang baik pula tentang tugas dan wewenang masing-masing pegawai dan dibantu dengan adanya pengawasan yang baik dari Kepala Unit maupun dari pejabat-pejabat BRI.

Dari kelima tahapan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen, menunjukkan adanya temuan kelalaian yakni kelalaian *Customer Service* meloloskan KTP yang sudah mati pada tahap permohonan kredit, kelalaian Mantri dalam menganalisis pendapatan calon

debitur pada tahap analisis kredit, dan kelalaian *Teller* dalam menuliskan nominal uang pada tahap pencairan kredit.

Kelalaian tersebut jika tidak dilakukan perbaikan akan mengakibatkan terhambatnya proses pemberian Kredit Usaha Rakyat. Namun, sejauh ini, kelalaian yang ditemukan tidak menghambat pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen karena pada setiap tahapan selanjutnya dilakukan pemeriksaan ulang.

Apabila kelalaian tersebut biasa diperbaiki, duplikasi pekerjaan juga akan berkurang sehingga pemberian Kredit Usaha Rakyat bisa berjalan lebih efektif.

Dari audit terinci yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pula bahwa pada pemberian Kredit Usaha Rakyat BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen masih memiliki pegawai yang minimal. Hal tersebut mengakibatkan pegawai tidak bekerja secara efektif karena adanya penumpukan kerja. Terbukti dengan adanya beberapa kelalaian yang ditemukan dan mengakibatkan adanya duplikasi pekerjaan. Namun, hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan, Gombong, Kebumen.

D. Keterbatasan Penelitian

BRI merupakan perusahaan yang memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Peneliti tidak diperbolehkan untuk mendapatkan SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang bagi sebuah penelitian audit merupakan kunci utama penelitian. Hal ini dapat berimplikasi pada objektivitas data yang diperoleh oleh peneliti. Namun, prosedur perusahaan dapat peneliti peroleh dari wawancara maupun kuesioner yang

diajukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan program pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan, Gombang, Kebumen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang Audit Manajemen atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Audit pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti merupakan tahap awal peneliti menganalisis pemberian Kredit Usaha Rakyat pada RI Unit Ahmad Yani Kota Makassar. Pada tahap audit pendahuluan ini didapatkan informasi mengenai BRI secara umum (*kondisi/condition*) dan informasi mengenai BRI secara khusus

(*kriteria/criteria*), yang meliputi:

- a. Deskripsi Data Umum Perusahaan, yang terdiri dari:

- 1) Sejarah singkat Bank Rakyat Indonesia.
- 2) Visi dan misi Bank Rakyat Indonesia.
- 3) Struktur Bank Rakyat Indonesia.

- b. Deskripsi Data Khusus Perusahaan, yang terdiri dari:

- 1) Struktur RI Unit Ahmad Yani Kota Makassar Tugas dan wewenang masing-masing jabatan.
- 3) Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat pada RI Unit Ahmad Yani Kota Makassar

2. Tahap *review* dan pengujian pengendalian manajemen dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dengan mengetahui

pengendalian internal pada setiap tahapan pemberian Kredit Usaha Rakyat. Tahap *review* dan pengujian pengendalian manajemen yang telah dilakukan oleh peneliti menghasilkan kesimpulan bahwa sistem pengendalian manajemen yang dilakukan pada pemberian Kredit Usaha Rakyat telah berjalan efektif. Tidak terdapat temuan kelemahan yang mengakibatkan pengendalian manajemen tidak berjalan efektif.

3. Tahap audit terinci telah dilakukan oleh peneliti. Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan bukti yang cukup kompeten dan menganalisisnya menjadi empat elemen, yaitu kondisi, kriteria, sebab, dan akibat. Dari analisis data yang telah dilakukan, audit terinci pada pemberian Kredit Usaha Rakyat telah berjalan efektif walaupun terdapat kelemahan berupa kelalaian. Namun, kelemahan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat pada RI Unit Ahmad Yani Kota Makassar

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saransaran atau rekomendasi yang dapat berguna bagi perbaikan pengelolaan dan penyelenggaraan program pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Ahmad Yani Kota Makassar. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Kelalaian yang terjadi bisa mengakibatkan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan tidak efektif. Oleh karena itu, pelatihan diperlukan saat masing-masing pegawai telah memahami tugas dan wewenangnya masing-masing untuk mematangkan dan melatih masing-masing pegawai agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Pelatihan

setelah pegawai mulai bekerja juga dilakukan agar tidak terdapat duplikasi pekerjaan sehingga dapat mengurangi ketidakefektifan pekerjaan.

2. Pada RI Unit Ahmad Yani Kota Makassar, personil pada masing-masing program masih minimal. Hal tersebut mengakibatkan pegawai tidak bekerja secara efektif karena adanya penumpukan kerja. Terbukti dengan adanya beberapa kelalaian yang ditemukan dan mengakibatkan adanya duplikasi pekerjaan. Untuk program pemberian Kredit Usaha Rakyat yang merupakan program utama di BRI Unit dan membutuhkan kinerja yang maksimal, maka diperlukan tambahan pegawai pada RI Unit Ahmad Yani Kota Makassar. Lebih khususnya lagi untuk program pemberian Kredit Usaha Rakyat, diperlukan tambahan *Customer Service* Kredit Usaha Rakyat dan Mantri Kredit Usaha Rakyat yang saat ini masih berjumlah satu orang di tiap jabatannya. Penambahan jumlah pegawai akan berakibat positif pada keefektifan program dan kinerja yang bisa lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin A. Arens, Elder, J.Randal, Beasley, S.Mark. (2008). *Auditing and Assurance Service an Integrated Approach*. 12th Edition. Upper Sadel River, New Jersey: Pearson Education International.
- Amin Widjaja Tunggal. (2008). *Audit Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Elvira Bartholomeus Tampang. (2011). *Audit Manajemen Atas Fungsi Keuangan pada PT. Tirta Makna Bahagia Makassar. Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Heru Basuki. (2006). *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Gunadarma.
- <http://www.bri.co.id>, pada tanggal 1 Februari 2013.
- IBK Bayangkara. (2011). *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Ismani, dkk. (2007). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Yogyakarta: UNY.
- Kerlinger, Fred N. (1986). *Asas-asas Penelitian Behavioral Edisi Ketiga, terjemahan Drs. Landung R Simatupang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2008). *Auditing*. Edisi ke-6. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- Sawyer, Lawrence B. (2005). *Internal Auditing*. Buku 1 Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Sondang P Siagian. (2001). *Audit Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukrisno Agoes. (1996). *Auditing: Pemeriksaan Akuntan*. Jilid II. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Thomas Suyatno. (2001). *Dasar-dasar Perkreditan*. Edisi ke 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Voni Astari. (2011). Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Perkreditan (studi kasus pada Bank Nagari Cabang Utama Padang). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.

LAMPIRAN



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Model 5-4

Kantor Wilayah Makassar
Gedung BRI, Lt. 3-5, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8 Makassar 90174 Indonesia
Telepon : (0411) 3616174
Facsimile : (0411) 3655351
Website : <http://www.bri.co.id>

SEGERA

Referensi : B.699.e-KW-XIII/SDM/07/2017

Keperluan :
Tujuan : Persetujuan Izin Penelitian an. Ariani

05 Juli 2017

Kepada Yth.
Ketua LP3M Unismuh
Di Tempat

LP3M Unismuh No.1005/Izn-5/C.4-VIII/VI/37/2017 Tanggal 5 Juni 2017

Sehubungan dengan Surat LP3M Unismuh tersebut di atas perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian / Wawancara, bersama ini disampaikan bahwa saya selaku Kepala Kantor Cabang Makassar-Ahmad Yani, dengan judul penelitian "*Strategi Pengembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Makassar pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani*". Nama yang dapat diberikan hanya data yang telah dipublikasikan dan bukan merupakan rahasia bank, kepada mahasiswa:

Nama Lengkap : Ariani
No. Stambuk : 10561 04375 13
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Surat ini berlaku sampai dengan 6 bulan sejak tanggal diterbitkan surat ini.
Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR WILAYAH MAKASSAR
BAGIAN HUMAN CAPITAL



IRWAN APRIANTORO
KEPALA BAGIAN

san
sip



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

10 Ramadhan 1438 H
05 June 2017 M

nomor : 1005/Izn-5/C.4-VIII/VI/37/2017
lampiran : 1 (satu) Rangkap Proposal
tujuan : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth,
Direktur Bank Rakyat Indonesia
Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani

di -

Makassar

السُّلْطَانَةُ الْعِلْمِيَّةُ وَرِثَةُ الْوَدَاعَةِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 0771/FSP/A.1-VIII/VI/1438II/2017M tanggal 6 Juni 2017, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

- Nama : **ARIANI**
- No. Stambuk : **10561 04375 13**
- Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
- Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
- Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Strategi Pengawasan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Makassar pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Juni 2017 s/d 10 Agustus 2017.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السُّلْطَانَةُ الْعِلْمِيَّةُ وَرِثَةُ الْوَدَاعَةِ

085 253 375 880

Ariani

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.



Nomor
Lamp.
Hal

: 0771/FSP/A.1-VIII/VI/1438 H/2017 M
: 1 (satu) Eksamplar
: **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Ariani

St a m b u k : 10561 04375 13

J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Lokasi Penelitian : Di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Ahmad
Yani

Judul Skripsi : ***“Strategi Pengawasan Program Kredit Usaha Rakyat
(KUR) di Kota Makassar pada Kantor Cabang Bank
Rakyat Indonesia Unit Ahmad Yani”***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 06 Juni 2017

D e k a n,
Ub. Pembantu Dekan I

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Ariani, di sapa Ani. Lahir pada tanggal 06 Juni 1993 di Ujung Pandang Kel. Buakana, kec. Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan. Merupakan anak ke-4 dari 6 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri langgong dan normah. Penulis menempuh pendidikan , pertama enam tahun di Sd Negeri Rappocini 1 Makassar dan selesai pada tahun 2006, penulis melanjutkan pendidikan Tingkat Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Belawa, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan tingkat Mengah Kejuruan di Smk Negeri 4 Makassar dan selesai pada tahun 2012. Kemudian tahun yang sama penulis bekerja selama satu tahun. Setelah pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba Ilmu Pengetahun yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.